

## **IMPLEMENTASI ASAS TATA RUANG WILAYAH DALAM PENATAAN KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU DI KABUPATEN BOYOLALI**

*(Implementation of Principles of Regional Spatial Planning in The Arrangement of Integrated Office Complexes  
in Boyolali District)*

**Natalia Suwarno\*, Sheva Annisa Putri Handayani**

*Universitas Katolik Soegijapranata*

\*Email: [nataliasuwarno@unika.ac.id](mailto:nataliasuwarno@unika.ac.id)

### ***Abstract***

*City and district government office areas are required to meet the principle of integration, to create integrated, fast, and appropriate public services. The principles of office layout that must be adhered to are integration; harmony, harmony, and balance; sustainability; usability and success; openness; togetherness and partnership; protection of public interest; legal certainty and justice; and accountability. Office units in Boyolali Regency were previously separated from each other, spread from Pengguh to Mojosongo. It is this separation of office spaces that makes this principle impossible. This paper aims to find out whether the offices in the Boyolali Regency area after being moved really meet this principle. This writing uses descriptive analysis by collecting data using literature sources in the form of books, regulations and the internet, complemented by interviews with resource persons. The results of this writing show that offices in the Boyolali regency area have met the principles of integrated office layout.*

***Keywords: Regional Spatial Planning, Office Complex, Regional Development***

### ***Abstrak***

Wilayah perkantoran pemerintah unit kota dan kabupaten diharuskan memenuhi asas keterpaduan, demi terciptanya pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, dan tepat. Asas tata ruang perkantoran yang harus ditepati adalah keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Unit perkantoran di wilayah Kabupaten Boyolali sebelumnya terpisah satu dengan lainnya, tersebar dari daerah Pengguh sampai dengan Mojosongo. Terpisahnya ruang-ruang kantor inilah yang menyebabkan asas tersebut tidak dapat terjadi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perkantoran di wilayah Kabupaten Boyolali setelah dipindahkan benar memenuhi asas ini. Penulisan ini menggunakan analisis deskriptif dengan mengumpulkan data menggunakan sumber literatur berupa buku, peraturan dan internet, dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwasannya perkantoran di wilayah kabupaten Boyolali telah memenuhi asas tata ruang perkantoran terpadu.

**Kata kunci: Tata Ruang Wilayah, Komplek Perkantoran, Pengembangan Wilayah**

## PENDAHULUAN

Hubungan antara peran pemerintah dan masyarakat menjadi hal penting di dalam pemerintahan daerah. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat bersifat demokratis, otoriter, atau didasarkan pada kepentingan tertentu, sehingga dapat terbentuk karena adanya ekspektasi akan adanya kompensasi. Dalam implementasi otonomi daerah, pemerintah membutuhkan fasilitas dan infrastruktur berupa kantor yang representatif. Kantor pemerintahan berfungsi sebagai tempat berbagai kegiatan administratif dan layanan publik bagi masyarakat.

Pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ekonomi yang cepat, bersamaan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Kabupaten Boyolali, mendorong meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, profesional, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Pemerintahan Kabupaten Boyolali berupaya memusatkan semua instansi dalam satu lokasi, dikarenakan persebaran letak instansi yang tersebar di seluruh Kabupaten Boyolali, yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja antar instansi sehingga pelayanan terhadap masyarakat dirasa kurang efektif. Pemindahan perkantoran dan instansi di Kabupaten Boyolali berada di tiga lokasi yang berbeda. Pemilihan lokasi dipengaruhi oleh letak geografis yang strategis dan memiliki interaksi tinggi ke beberapa kota, yaitu Semarang, Surakarta, Klaten, dan Yogyakarta.

Dalam melakukan pemindahan lokasi perkantoran menjadi Komplek Perkantoran Terpadu perlu adanya analisis peranan asas tata ruang wilayah, salah satunya yaitu berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 26 Tahun 2007 (Republik

Indonesia, 2007), pengaturan tata ruang di Indonesia dilakukan dengan merujuk pada beberapa prinsip dasar, termasuk prinsip keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran penerapan asas tata ruang wilayah dalam pengimplementasiannya terhadap penataan Komplek Perkantoran Terpadu di Kabupaten Boyolali yang sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Boyolali dan kesesuaiannya terhadap asas desain kantor pemerintahan.

## LANDASAN TEORI

### 1. DEFINISI KANTOR

Kantor didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sebuah balai (ruang, gedung, dan rumah) yang digunakan untuk mengurus suatu pekerjaan (suatu instansi atau perusahaan) atau tempat bekerja.

Kantor (Britannica, n.d.) biasanya didefinisikan sebagai tempat di mana berbagai macam kegiatan operasi organisasi dilakukan untuk mencapai tujuannya. Namun, dengan kemajuan saat ini, kantor berfungsi lebih dari hanya sebagai tempat untuk berkumpul, tetapi juga sebagai tempat untuk berbagi informasi dan membantu kegiatan di segala bidang berjalan lancar.

Dengan demikian, kantor dapat digambarkan sebagai lokasi kegiatan menangani informasi dan proses menangani data, yang mencakup menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mengirimkan atau menyebarkan data. (Halimah, 2018)

## 2. DEFINISI PERKANTORAN

Perkantoran modern dapat dijelaskan sebagai kompleks bangunan dengan tata letak yang optimal, dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas yang sesuai. Karyawan di dalamnya diharapkan menjalankan tugas mereka dengan disiplin, serta menunjukkan sikap, pola pikir, dan tindakan yang sesuai dengan perkembangan zaman (Siregar, 2017)

## 3. DEFINISI TERPADU

Terpadu berasal dari istilah "padu," yang mengindikasikan kesatuan. Konsep terpadu merujuk pada penggabungan berbagai jenis kegiatan, termasuk kegiatan umum, khusus, dan kegiatan lainnya. (Al-Amin, 2019)

Arti terpadu dalam kompleks perkantoran (Richter et al., 2019) yaitu menyatukan berbagai kantor pemerintahan dan instansi daerah yang ada dalam satu kawasan atau kompleks, yang nantinya mampu mengatasi permasalahan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pelayanan antar pemerintah dan masyarakat.

## 4. DEFINISI TATA RUANG

Tata Ruang merupakan suatu sistem proses yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang (adminpertarung, 2021). Menurut UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Republik Indonesia, 2022), definisi ruang mencakup wilayah darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan serta menjaga kelangsungan hidupnya (Republik Indonesia, 2022).

Berlandaskan Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007, pelaksanaan penataan ruang bertujuan untuk mencapai keamanan, kenyamanan, produktivitas, dan

keberlanjutan wilayah nasional. Tujuan ini didasarkan pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional (Mukhlis, & Padilah, A. H., 2023) dengan aspek mencakup keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Republik Indonesia, 2007)

## 5. ASAS TATA RUANG

Dalam merancang penataan kawasan Komplek Perkantoran Terpadu perlu adanya prinsip yang menjadi dasar perencanaan dan penataan tata ruang, dengan tujuan agar bangunan yang ada di dalam kawasan tersebut menjadi terintegritas dan seimbang, serta agar di dalam kawasan tersebut tercipta penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa dalam kerangka NKRI, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
- c. Keberlanjutan
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- e. Keterbukaan
- f. Kebersamaan dan kemitraan
- g. Perlindungan kepentingan umum
- h. Kepastian hukum dan keadilan
- i. Akuntabilitas

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah asas tata ruang telah diimplementasikan dalam penataan Komplek Perkantoran Terpadu di Kabupaten Boyolali. Letak Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali terdiri dari tiga lokasi, lokasi pertama berada di Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Kec. Mojosongo dan lokasi kedua berada di Jl. Handayani, Tegalarum, Kemiri, Kec. Mojosongo. Lokasi pertama dan kedua berada di Desa Kemiri tetapi lokasi kedua berada di seberang jalan dari kompleks perkantoran pertama. Sedangkan lokasi ketiga berada di Komplek Perkantoran Alun - Alun Lor, Kragilan, Kec. Mojosongo.



**Gambar 1. Lokasi Komplek Perkantoran Terpadu**

(Sumber: Google Maps dengan Modifikasi Penulis, 2024)

Lokasi Penelitian (Gambar 1) diambil dengan memilih Komplek Perkantoran yang memiliki fasilitas penunjang yang lengkap dan menjadi pusat keramaian masyarakat dibandingkan dengan Komplek Perkantoran lainnya. Sehingga didapatkan lokasi sampel penelitian berada di Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Terdapat 12 ha dengan luas area terbangun  $\pm 62.490 \text{ m}^2$  (52%) dan ruang

terbuka hijau  $57.510 \text{ m}^2$  (48%). (Mahendra, Dicky, Dr. Ir. Arif Kusumawanto M.T; Ir. Slamet Sudibyo, 2018)

Pengumpulan data melalui tiga cara, yaitu observasi untuk mengamati kondisi di kawasan yang akan diteliti, dokumentasi dengan mengambil gambar situasi setempat, dan wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber tentang aspek yang tidak diperoleh selama observasi. Sampel nantinya akan dihubungkan dengan penerapan asas tata ruang wilayah yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu membahas antara lain:

- Pengaruh dari pemindahan dan penataan lokasi Komplek Perkantoran Terpadu di Kabupaten Boyolali terhadap masyarakat, pemerintah, dan kota.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan dasar teori dan peraturan yang berlaku dalam perancangan kompleks kantor pemerintahan daerah.

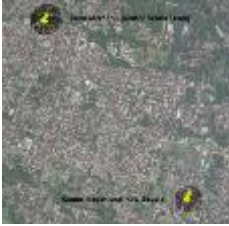
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
**HASIL**


• **Lokasi Kantor**

**Tabel 1. Lokasi Kantor**

No.	Nama Kantor	Lokasi (2010)	Lama	Lokasi Lama & Lokasi Baru	Foto Kondisi Setelah Relokasi
1	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	Jalan Pandanaran (saat ini menjadi Taman Pandanalas).		 <p><b>Gambar 2. Lokasi Kantor Satpol PP</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	 <p><b>Gambar 3. Kantor Satpol PP</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>
2	Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKP2D)	Bernaung di Kantor Sekretariat Daerah Boyolali pada lokasi lama.		 <p><b>Gambar 4. Lokasi Kantor BKP2D</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	 <p><b>Gambar 5. Kantor BKP2D</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>
3	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	Alun- Alun Lor (saat ini menjadi Mal Pelayanan Publik/ MPP).		 <p><b>Gambar 6. Lokasi Kantor DP2KBP3A</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	 <p><b>Gambar 7. Kantor DP2KBP3A</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>
4	Kantor Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA/ BP3D)	Jalan Merbabu (saat ini menjadi PT. Aneka Karya).		 <p><b>Gambar 8. Lokasi Kantor BAPPEDA</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	 <p><b>Gambar 9. Kantor BAPPEDA</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>



5	Kantor Inspektorat Kabupaten Boyolali	Bernaung di Kantor Sekretariat Daerah Boyolali pada lokasi lama.		
			<p><b>Gambar 10. Lokasi Kantor Inspektorat</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p><b>Gambar 11. Kantor Inspektorat</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>
6	Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)	Jalan Perintis Kemerdekaan (saat ini menjadi Komisi Pemilihan Umum/ KPU).		
			<p><b>Gambar 12. Lokasi Kantor DISDUKCAPIL</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p><b>Gambar 13. Kantor DISDUKCAPIL</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>
7	Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL)	Pada 2010 belum ada kantor Kesbangpol karena merupakan instansi baru saat dibangunnya Komplek Perkantoran.		
			<p><b>Gambar 14. Lokasi Kantor KESBANGPOL</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p><b>Gambar 15. Kantor KESBANGPOL</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>
8	Kantor Bupati, Pendopo Ageng, dan Alun-Alun Kidul	Jalan Merbabu (saat ini menjadi Rumah Dinas Bupati).		
			<p><b>Gambar 16. Lokasi Kantor Bupati</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p><b>Gambar 17. Kantor Bupati</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>
9	Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD)	Jalan Merbabu (saat ini menjadi bagian area SMP N 1 Boyolali).		
			<p><b>Gambar 18. Lokasi Kantor BKD</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p><b>Gambar 19. Kantor BKD</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>

10	Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Jalan Merbabu (saat ini menjadi lapangan basket milik SMP N 1 Boyolali).		
			<p><b>Gambar 20. Lokasi Kantor DPRD</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p><b>Gambar 21. Kantor DPRD</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>
11	Kantor Sekretariat Daerah	Jalan Merbabu, sebelah Timur Rumah Dinas Bupati.		
			<p><b>Gambar 22. Lokasi Kantor Sekda</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p><b>Gambar 23. Kantor Sekda</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>
12	Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jalan Pandanaran (saat ini menjadi Kantor Kelurahan Banaran, Kec. Boyolali).		
			<p><b>Gambar 24. Lokasi Kantor Disdikbud</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p><b>Gambar 25. Kantor Disdikbud</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>
13	Laboratorium Kesehatan Daerah	Jalan Manggis.		
			<p><b>Gambar 26. Lokasi Labkesda</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p><b>Gambar 27. Labkesda</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>
14	Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)	Jalan Pandanaran, saat ini berada di lokasi yang sama pada tahun 2010.		
			<p><b>Gambar 28. Lokasi SAMSAT</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p><b>Gambar 29. Kantor SAMSAT</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>


<p>15 Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</p>	<p>Jalan Raya Boyolali – Solo Km. 2, saat ini berada di lokasi yang sama pada tahun 2010 namun mengalami perluasan lahan.</p>	 <p><b>Gambar 30. Lokasi Kantor BPBD</b> (Sumber: Google Earth dengan Modifikasi Penulis)</p>	 <p><b>Gambar 31. Kantor BPBD</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>
---	---	--	---

(Sumber: Dokumen Pribadi)



**PEMBAHASAN**




- Asas Tata Ruang Wilayah

**Tabel 2. Analisis Asas Tata Ruang Wilayah**

No.	Asas Tata Ruang Wilayah	Analisa	Keterangan
<p>1</p>	<p>Keterpaduan</p>	 <p><b>Gambar 32. Analisis Keterpaduan</b> (Sumber: Google Maps dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p>Sebagai contoh, dalam struktur organisasi pemerintahan khususnya di tingkat Kabupaten, kedudukan tertinggi adalah Bupati dan dalam struktur organisasi dibawah bupati, terdapat jabatan Sekretariat Daerah (Sekda). Oleh karena itu, kantor Sekretariat Daerah (Sekda) diletakkan berdekatan dengan kantor Bupati.</p> <p>Hal ini dilakukan agar lintas sektoral, atau hubungan antar-sektor, dapat terjalin dengan lebih mudah. Dengan demikian, koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah dapat berlangsung efektif dan efisien.</p>



<p>2</p> <p>Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan</p>	 <p><b>Gambar 33. Analisis Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan</b> (Sumber: Google Maps dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p>Keserasian dibuktikan dengan menyesuaikan akses dari beberapa kota, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses ke Solo &amp; Semarang: Jl. Raya Boyolali-Semarang</li> <li>- Akses ke Klaten &amp; Jogja: Jl. Jatinom- Boyolali</li> <li>- Akses Jalan Lingkar: Jl. Perintis Kemerdekaan</li> </ul> <p>Keselarasn terbukti dengan lokasi ini menjadi pusat keramaian oleh warga sekitar dari yang sebelumnya hanya kebun milik perseorangan.</p> <p>Keseimbangan terbukti dengan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan baik untuk daerah, masyarakat, maupun pemerintah.</p>
<p>3</p> <p>Keberlanjutan</p>	 <p><b>Gambar 34. Penataan Vegetasi</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>	<p>Terbukti dengan desain bangunan yang sesuai dengan peraturan RTH setempat, vegetasi yang ada dalam komplek sangat terawatt, salah satunya vegetasi sebagai pembatas jalan pada area komplek, dan semua aspek fungsi gedung sudah terpenuhi.</p>

<p>4</p> <p>Keberdaya gunaan dan Keberhasil gunaan</p>	 <p><b>Gambar 35. Zona Terbangun</b> (Sumber: Google Maps dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p>Terbukti dengan tidak semua lahan yang ada di dalam Komplek dibangun bangunan sehingga masih ada RTH dan area publik. Serta merupakan satu-satunya area publik terbesar di Boyolali sehingga dapat menghidupkan kota Boyolali.</p>
<p>5</p> <p>Keterbuka an</p>	<p>Prinsip keterbukaan menitikberatkan pada pemberian hak yang setara kepada seluruh anggota masyarakat untuk menikmati keuntungan atau peningkatan nilai ruang, dan memberikan hak yang pantas untuk mendapatkan kompensasi atas dampak yang mereka alami akibat aktivitas pembangunan yang sesuai dengan perencanaan. (Imran, 2013)</p>	<p>Terbukti dengan pemerintah membeli lahan milik warga, sehingga terdapat komunikasi dan keterbukaan disini.</p>
<p>6</p> <p>Kebersama an dan Kemitraan</p>	 <p><b>Gambar 36. Zonasi Alun- Alun</b> (Sumber: Google Maps dengan Modifikasi Penulis)</p>	<p>Terbukti dengan pemerintah lebih terintegrasi secara baik dan masyarakat lebih diuntungkan dengan adanya area publik yang memadai serta dapat membuka lapangan pekerjaan untuk pedagang kaki lima, selain itu harga tanah milik warga di sekitar lokasi kompleks justru mengalami kenaikan harga. Sehingga semua pihak dapat menerima dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Terbukti juga dengan tidak adanya unjuk rasa mulai dari proses pembangunan sampai saat ini.</p>
<p>7</p> <p>Perlindung an Kepenting an Umum</p>	 <p><b>Gambar 37. Kantor Bupati Tanpa Pagar</b> (Sumber: Dokumentasi Pribadi)</p>	<p>Terbukti dengan tujuan dibangunnya kompleks ini untuk pelayanan masyarakat dan dalam penerapan konsep desain bangunan tanpa sekat/pagar yang membatasi, sehingga memberikan kesan keterbukaan dan tanpa</p>

			batasan pemerintah dan masyarakat.
8	Kepastian Hukum dan Keadilan	Menurut Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Boyolali pada tahun 2010, pembangunan Komplek Perkantoran Terpadu di Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	Terbukti dengan selama adanya proses jual beli dilindungi oleh hukum, notaris, dan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Serta terdapat sertifikat untuk masing-masing baik masyarakat dan pemerintah.
9	Akuntabilitas	Tahap Pembangunan Kantor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2010- 2011: Kantor Bupati, Bappedda, BKD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPPD dan Samsat</li> <li>- Tahun 2012- 2013: Kantor Satpol PP, BKP2D, Inspektorat, DPRD, Sekretariat Daerah, BPBD</li> <li>- Tahun 2014- 2015: Kantor DP2KBP3A, Disdukcapil, Kesbangpol, dan Labkesda</li> </ul>	Terbukti dengan semua <i>stakeholder</i> mengikuti beberapa tahapan pembangunan dan mengikuti ketersediaan anggaran ataupun serapan dana.

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Asas tata ruang wilayah menjadi landasan dalam penataan Komplek Perkantoran Terpadu di Kabupaten Boyolali. Pemahaman mendalam mengenai asas tata ruang wilayah berpengaruh untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam pelayanan masyarakat dan keberlanjutan dalam pengembangan wilayah yang berpedoman pada 9 poin asas pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. (Republik Indonesia, 2007)

Adanya relokasi dan penataan perkantoran ke Komplek Perkantoran Terpadu bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar instansi yang saling berkaitan (Maulidiah, 2014). Perlu dipikirkan aspek-aspek asas tata ruang wilayah dalam program pembangunan. Tahapan yang (KemenPUPR (2016)) dilakukan yaitu gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan. Dalam hal ini pihak yang saling berintegrasi dalam pembuatan masterplan yaitu Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) atas petunjuk dan perintah dari Bupati.

Hambatan dalam relokasi dan penataan Komplek Perkantoran Terpadu yaitu dalam pendanaan dan ketersediaan lahan (Sulistyawati (2013)). Untuk mengatasi hambatan tersebut maka Komplek Perkantoran dibagi menjadi 3 lokasi yang berbeda dan dalam pembangunannya dilakukan secara bertahap.

Keterlibatan masyarakat dalam proyek ini juga merupakan satu hal yang penting, karena lahan untuk dibangunnya proyek ini beberapa merupakan kebun miik warga, sehingga perlu adanya pendekatan persuasif, koordinasi, dan sosialisasi dari pihak pemerintah.

Dalam relokasi dan penataan Komplek Perkantoran Terpadu, desain dari masing-masing bangunan juga perlu diperhatikan, konsep bangunan perkantoran di Komplek Perkantoran yaitu semi terbuka, dengan tidak adanya sekat/ pagar keliling untuk masuk kedalam area gedung. Selain itu

karena pada lokasi ini berada di lingkup kaki gunung Merapi dan Merbabu, maka terdapat aksen khusus berupa batu alam/ batu lempeng yang dalam filosofinya yaitu material yang dihasilkan dari gunung tersebut. Konsep tata ruang dalam bangunan berbentuk letter "O" (Marwoto (2013)a) sebagai penghawaan alami dengan adanya void pada tengah bangunan namun masih saling terhubung dan terintegrasi. Pendekatan desain mengarah pada Jawa semi kolonial (Marwoto (2013)b). Semua bangunan perkantoran memiliki konsep desain yang sama, hanya terdapat perbedaan dalam luasan bangunan. Dengan adanya konsep desain yang sama dapat memberikan ciri khas dan *point of view* tersendiri pada Komplek Perkantoran Terpadu di Kabupaten Boyolali.

## SIMPULAN

- Relokasi dan penataan perkantoran ke Komplek Perkantoran Terpadu memberikan dampak positif pada masyarakat, pemerintah, dan kota. Masyarakat mendapatkan kemudahan akses dalam layanan pemerintahan, adanya wadah untuk UMKM, kenaikan nilai tanah di sekitar kompleks, dan adanya ruang publik baru untuk beraktivitas. Bagi pemerintah, kompleks tersebut meningkatkan struktur dan integrasi kinerja dengan dinas/ instansi terkait serta memperbaiki efisiensi pelayanan. Dampak positif pada masyarakat dan pemerintah juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kemajuan daerah secara keseluruhan.
- Kajian ini dapat dijadikan salah satu dasar dalam pembuatan ruang kantor pemerintahan kota/kabupaten di Indonesia apabila menggunakan dasar asas yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- adminpertarung. (2021). *Pengertian Tata Ruang*.
- Al-Amin, A. A. U. (2019). *Perancangan Kantor Terpadu Kabupaten Sidoarjo Dengan Pendekatan High Tech Architecture*.
- Britannica. (n.d.). *Office Description*. Britannica.  
<https://www.britannica.com/dictionary/office>
- Halimah, M. (2018). Konsep dan Ruang Lingkup Administrasi Perkantoran. *Administrasi Perkantoran*, 1–43.
- Imran, S. Y. (2013). Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 458–467.
- Mahendra, Dicky, Dr. Ir. Arif Kusumawanto M.T; Ir. Slamet Sudibyo, M. . (2018). *Model Kawasan Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Boyolali Yang Ramah Lingkungan Dengan Simulasi Floor Area Ratio UMI*.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Publik: Pelayanan Publik Terpadu Kecamatan*.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. In *Undang - undang No. 26 tahun 2007 tentang tata ruang* (Vol. 110, Issue 9, pp. 1689–1699).
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja* (Issue 158406).
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (2019). *ACHIEVING SUSTAINABLE AND INTER-DEPENDENT GROWTH THROUGH MUTUAL COOPERATION*.
- Siregar, F. A. (2017). Implementasi Manajemen Perkantoran Modern Di Sekolah Mas Amaliyah Sunggal. *Jurnal Tarbiyah*, 24(2), 246–265.